

SKRIPSI

FAKTOR FAKTOR PENDUKUNG YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NURUL IZZAH MAHYUDDIN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

FAKTOR FAKTOR PENDUKUNG YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL IZZAH MAHYUDDIN

A031191193



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

FAKTOR FAKTOR PENDUKUNG YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL IZZAH MAHYUDDIN
A031191193

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 Februari 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M. Si., Ak., CA
NIP: 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping

Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM
NIP : 19660110 199203 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syaiful Anwar Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

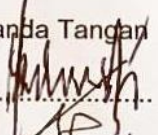
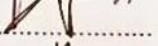
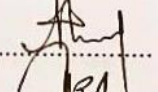
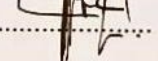
FAKTOR FAKTOR PENDUKUNG YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Disusun dan diajukan oleh:


NURUL IZZAH MAHYUDDIN
A031191193

Telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
Pada tanggal **16 Mei 2024** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M. Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3. 
4.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA	Anggota	4. 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA 
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Izzah Mahyuddin

NIM : A031191193

Jurusan/program studi : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

FAKTOR FAKTOR PENDUKUNG YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurul Izzah Mahyuddin

PRAKATA

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karena berkat rahmat dan karunianya yang tiada henti kepada hambanya. Serta Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, shaabat, dan para pengikutnya. Atas berkat dan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, support, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan penghargaan dan puji syukur serta terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua tercinta penulis, Bapak Drs. Ir. Mahyuddin M.,Si dan Ibu A. Anugrahwaty serta Kakak saya Saudara Mohammad Agung Mahyuddin atas selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan nasehat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CPIM, CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakulta Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Nirwana, S.E., M.Si.Ak selaku dosen penasihat akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nirwana, S.E., M.Si.Ak dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan koreksi untuk penulis sehingga menghasilkan penulisan skripsi yang lebih baik lagi.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Nabila Handayani Dewantari, Syaikhah Syuhrah, Sitti Deapati Puteri, Rezqinah Azzahrah, Titin Aryani, Rezky Indah Lestari, Nurwaina Fattah, Muh. Farhan, Aqila Azzahrah, Nur Rifdah Zain, Wahyu dwi rahmawaty, Ina, Novita, Atun, Tiwy, Andini, Ainun, yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, bersedia memberikan waktunya dalam bertukar ilmu, dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Segala pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan seluruh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua.

Makassar, 4 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Izzah Mahyuddin'.

Nurul Izzah Mahyuddin

ABSTRAK

Faktor Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nurul Izzah Mahyuddin
Mediaty
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan total asset, jumlah SKPD, jumlah temuan audit, rasio kemandirian, jumlah populasi, dan tingkat kesejahteraan sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh kabupaten provinsi Sulawesi selatan pada periode 2019-2021. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling sehingga sampel yang digunakan adalah 42 sampel laporan keuangan pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan jumlah populasi, kesejahteraan, total asset, jumlah SKPD, dan rasio kemandirian memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Kata Kunci: Tingkat Pengungkapan LKPD; Asset; Jumlah SKPD; Jumlah Temuan Audit; Rasio Kemandirian; Jumlah Populasi; Kesejahteraan.

ABSTRACT

Supporting Factors Influencing the Level of Disclosure of Local Government Financial Reports

Nurul Izzah Mahyuddin
Mediaty
Abdul Rahman

This research aims to examine the supporting factors that influence the level of disclosure of local government financial reports. The study utilizes total assets, the number of regional work units (SKPD), the number of audit findings, self-reliance ratio, population size, and welfare level as independent variables. Meanwhile, the dependent variable in this research is the level of disclosure of local government financial reports. The population in this study consists of financial reports of local governments in all districts of South Sulawesi province during the period 2019-2021. The sampling technique used in this research is purposive sampling, resulting in 42 samples of local government financial reports. The analysis method employed is panel data regression analysis. Based on the test results, it is indicated that the number of audit findings do not have a significant influence on the disclosure level of local government financial reports (LKPD). However population size, welfare level, total assets, the number of SKPD, and self-reliance ratio have a significant impact on the disclosure level of LKPD.

Keywords: *LKPD Disclosure Level, Assets, Number of SKPD, Number of Audit Findings, Self-Reliance Ratio, Population Size, Welfare.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	29
2.4 Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu.....	38
3.3 Populasi dan Sampel	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Variabel Penelitian	40
3.7 Instrumen Penelitian	44
3.8 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
4.1 Deskripsi Data Penelitian	51
4.2 Hasil Pengujian Hipotesis.....	54

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
5.3 Keterbatasan penelitia	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Rincian Perolehan Sampel Penelitian	52
4.2 Hasil Scoring item pengungkapan wajib.....	53
4.3 Descriptive Statistics.....	54
4.5 Uji Normalitas	58
4.6 Uji Multikolinearitas	59
4.7 Uji Koefisien Determinasi	61
4.8 Uji Statistik F.....	61
4.9 Uji Statistik t.....	63
4.10 Hasil Penelitian	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	29
4.1 Grafik Uji Heteroskedastisitas	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2014 Indonesia resmi menjalankan otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah, dan pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk memperoleh dana untuk mengelola semua urusan pemerintahan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Penerimaan dana yang diperoleh serta penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran selama satu periode, pemerintah daerah dapat menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan ini dibuat untuk menginformasikan hal-hal yang dimuat dalam laporan keuangan kepada pihak yang membutuhkan, seperti stakeholder dan pihak yang berada diluar pemerintahan. Penyampaian informasi keuangan tersebut bertujuan untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat daerah, bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat, dan sebagai tolak ukur dalam membuat keputusan di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015). Selain itu

pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah juga berguna sebagai bahan evaluasi apakah anggaran yang telah diberikan sudah dipergunakan secara efektif dan optimal, serta pengungkapan diperlukan untuk membantu menentukan ketaatan suatu daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan megaudit laporan keuangan yang disusun sesuai SAP dan kemudian dapat diberikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat. Untuk menghasilkan pengungkapan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP). Paragraf 53 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan memuat informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada halaman utama (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang ditentukan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mempunyai peranan yang penting yaitu membantu pengguna laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan pemerintah serta dapat meningkatkan transparansi keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa CaLK disajikan secara sistematis. Halaman Utama (*on the face*) yang dimaksud dalam paragraf 53 kerangka acuan konseptual, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL),

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE harus memiliki referensi silang dengan informasi yang berkaitan dalam CaLK. Penjelasan atau analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE terdapat dalam CaLK. Pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Minimum pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku adalah pengungkapan wajib (Yulianingtyas, 2010). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dengan menyatakan bahwa entitas pelapor mengungkapkan informasi terkait kepatuhan terhadap anggaran, dalam paragraph berikutnya yang menjelaskan pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang diperlukan bagi pengguna. Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan kesalahan atau kesalahpahaman saat membaca laporan. Namun kenyataannya Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan yaitu menurut Uci Febriani *et.al* (2021) mengatakan bahwa tingkat pengungkapan pada tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur sebesar 69% sedangkan di provinsi Kalimantan utara sebesar 43%, menurut Muhammad Al Ayyuuby (2021) Rata-rata Tingkat Pengungkapan LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia pada Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar 48,22%, menurut Marsella *et.al* (2019) tingkat pengungkapan di provinsi Sumatera rata-rata adalah sebesar 82,7%, dan menurut Rianti Kusuma *et.al* (2021) tingkat pengungkapan LKPD di pulau Jawa pada tahun 2019 masih rendah yaitu rata-rata sebesar 80,58%. Sehingga melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat

simpulkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya. Sedangkan tingkat pengungkapan merupakan faktor penting untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas agar dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan tidak menyimpang (Pandansari, 2016).

Tingkat pengungkapan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Simbolon *et.al* (2018) ukuran pemerintah daerah yang dihitung menggunakan total asset, ukuran legislative, dan rasio kemandirian dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan, menurut Ridwan *et.al* (2020) tingkat ketergantungan daerah, temuan audit, jumlah SKPD, dan ukuran legislative dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan, menurut Amaliah *et.al* (2019) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan temuan audit dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD.

Namun faktor-faktor tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten seperti penelitian yang dilakukan oleh Simbolon *et.al* (2018) yang menyatakan bahwa faktor ukuran pemerintah yang dihitung dengan menggunakan total asset berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Putri *et.al* (2019), dan Marliani *et.al* (2018). Sedangkan Naopal *et.al* (2017), Budiarto *et.al* (2019), dan Setyaningrum *et.al* (2012) menyatakan bahwa faktor ukuran pemerintah yang dihitung dengan menggunakan total asset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun faktor lain yang masih menunjukkan perbedaan pendapat adalah faktor Jumlah SKPD.

Menurut Rahim *et.al* (2020) mereka menyatakan bahwa faktor jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah

daerah. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ridwan *et.al* (2020) dan Finakesti *et.al* (2022). Sedangkan menurut Simbolon *et.al* (2018), Putri *et.al* (2019), dan Setyaningrum *et.al* (2012) menyatakan bahwa faktor jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan informasi yang tersedia dan kesulitan dalam menentukan alasan penelitian menyebabkan penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah ini masih kurang dibandingkan dengan penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini sangat penting karena bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat kepatuhan dan ketaatan pemerintah daerah terhadap Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis akan meneliti menggunakan enam Variabel yaitu Total Aset, Jumlah SKPD, Temuan Audit, Rasio Kemandirian, Jumlah Populasi, dan menambahkan variabel Kesejahteraan sebagai variabel yang masih jarang diteliti.

Alasan peneliti menambahkan variabel kesejahteraan karena Tingkat kesejahteraan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Jika tingkat kesejahteraan yang rendah, maka pemerintah daerah akan lebih fokus pada kegiatan pengembangan dan pengembangan infrastruktur, sehingga tingkat pengungkapan akan lebih tinggi. Sedangkan jika tingkat kesejahteraan yang tinggi, pemerintah daerah akan

lebih fokus pada pemeliharaan dan pengembangan yang lebih efektif, sehingga tingkat pengungkapan juga akan tinggi.

Selain hal tersebut apabila tingkat kesejahteraan tinggi maka secara politik tuntutan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu semakin tinggi, serta tuntutan transparansi pengelolaan keuangan daerah juga semakin tinggi. Tingkat kesejahteraan tercermin dari tingkat pendapatan rata-rata pada masyarakat dan secara operasional dapat diukur dari PDRB per kapita pada suatu wilayah hal tersebut sesuai dengan cara pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Nor *et.al* (2019).

Sedangkan alasan peneliti mengambil variabel Total Aset, Jumlah SKPD, Temuan Audit, Rasio Kemandirian, dan Jumlah Populasi karena Total asset memiliki nilai yang lebih stabil dan juga total asset dapat menggambarkan seberapa besar pemerintahan itu, sehingga semakin besar ukuran pemerintahan itu maka semakin besar pula tuntutan dalam transparansi pengungkapan laporan keuangan.

Jumlah SKPD akan menggambarkan seberapa kompleks pemerintahan tersebut sehingga tuntutan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan akan semakin besar pula (Hilmi *et.al*, 2012). Dengan adanya temuan audit, maka BPK akan meminta melakukan koreksi dan meningkatkan pengungkapannya. Sehingga, jika semakin besar jumlah temuan audit maka semakin besar pula jumlah tambahan pengungkapan yang akan diminta oleh BPK dalam laporan keuangan.

Tujuan dari rasio kemandirian keuangan daerah adalah untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah dapat beroperasi tanpa bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah

daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan tuntutan transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan. Akibatnya, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, semakin banyak pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Dwirandra, 2008).

Jumlah penduduk dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa kompleks suatu wilayah. Permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan jumlah penduduk, yang berarti lebih banyak informasi yang perlu diungkapkan (Hilmi *et.al*, 2012).

Periode LKPD yang akan digunakan adalah LKPD 2019-2021 yang telah diaudit, dimana akan menghasilkan penelitian yang lebih *up to date* sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pemerintahan pada saat ini dan dapat memberikan hasil yang lebih signifikan. Dan juga penelitian kali ini akan meneliti tentang tingkat pengungkapan secara keseluruhan sesuai dengan kriteria di PSAP dengan data LKPD Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Sulawesi selatan yang telah diaudit. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Faktor Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Total Asset mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Jumlah SKPD mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah Jumlah Temuan Audit mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Raio Kemandirian mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah Jumlah Populasi mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah Kesejahteraan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Total Asset mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Untuk menganalisis apakah Jumlah SKPD mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Untuk menganalisis apakah Jumlah Temuan Audit mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Untuk menganalisis apakah Rasio Kemandirian mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Untuk menganalisis apakah Jumlah Populasi mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Untuk menganalisis apakah Kesejahteraan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan literature-literatur akuntansi yang sudah ada, dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki kajian sejenis. Serta dapat berguna untuk memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

b. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil objek penelitian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota dan kabupaten di provinsi Sulawesi selatan periode 2019-2021 yang telah diaudit. Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian pada karakteristik pemerintah yang dilihat dari variable total asset, kompleksitas pemerintahan yang dilihat dari variable jumlah SKPD, hasil audit yang dilihat dari variable jumlah temuan audit dari BPK, Seberapa baik pemerintah daerah dapat beroperasi tanpa bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang dilihat dari variabel Rasio Kemandirian. Kompleksitas

wilayah dilihat dari Jumlah Populasi, dan Kesejahteraan dilihat dari pendapatan perkapita tiap daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian. Sistematika penulisan pada penelitian kali ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar (2012). Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan teori dan konsep, tinjauan empiric, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Stewardship Theory* dalam Pemerintahan

Stewardship Theory adalah sebuah teori yang dimana menggambarkan sebuah situasi para *steward* (penerima amanah) tidaklah termotivasi oleh tujuan individu semata tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007).

Teori ini juga menjelaskan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, dimana kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan utilitas principals dan *steward*. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*) (Donaldson & Davis, 1989, 1991).

Selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Khasanah (2014) menjelaskan *Stewardship* sebagai hubungan yang terbentuk antara *principal* yang bertindak sebagai pihak pemberi amanah dan pemerintah yang bertindak sebagai *steward*, hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, dimana sesuai dengan sifat dasarnya bahwa manusia dapat berperilaku bertanggung jawab, berintegritas dan tidak merugikan orang lain.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan, pemerintah berperan sebagai pihak yang diberikan amanah yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan masyarakat dan harus menyadari hal tersebut guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya tujuan tersebut dapat memberikan kepuasan atas kinerja pemerintahan yang baik terhadap rakyat yang telah memberikan amanah.

Secara umum, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk mewujudkan pelaksanaan good governance yang baik, salah satunya dapat berupa upaya pertanggungjawaban melalui laporan keuangan.

2.1.2 Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) laporan keuangan adalah "Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LKPD disajikan dengan dilampiri ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.

Selanjutnya LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”.

Laporan keuangan merupakan alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama yang berada di luar instansi pemerintahan dengan tujuan mempertanggungjawabkan kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program serta aktivitas yang telah dilakukan (Wahyundaru, 2001; Cohen dan Kaimenakis, 2008).

Adapun tujuan laporan keuangan untuk instansi pemerintahan atau organisasi nirlaba adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk memantau efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Jones, 1992).

Tujuan dan fungsi pelaporan keuangan pemerintah dapat tercapai apabila ciri-ciri berikut terpenuhi, yaitu (Mardiasmo, 2002):

- a. Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk dapat memberikan keyakinan kepada pemakai informasi dan otoritas lain bahwa pemerintah telah mengelola sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2002).
- b. Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Melalui DPRD, masyarakat dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja dari

pemerintah, dan dapat memberikan dasar untuk mengamati pencapaian target secara berkala, dan membandingkannya dengan pemerintah lain (Mardiasmo, 2002).

- c. Laporan keuangan sekiranya dapat memberikan informasi mengenai keuangan yang akan digunakan untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terhadap pencapaian tujuan operasional (Mardiasmo, 2002).
- d. Laporan keuangan pemerintah sekiranya dapat digunakan untuk memperkirakan aliran kas, saldo anggaran, serta kebutuhan sumber pendanaan pemerintah dan unit kerja pemerintah (Mardiasmo, 2002).
- e. Laporan keuangan pemerintah sekiranya dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan dalam hal ekonomi, politik, dan sosial (Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran penting untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah kepada publik hal ini karena prinsip akuntabilitas mewajibkan kepada pemerintah untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui atau memperoleh fakta yang diungkapkan secara terbuka yang memungkinkan untuk dipahami dan dapat dimengerti oleh masyarakat (Kasijan, 2009).

Agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami serta dapat dimengerti oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan

maka laporan keuangan pemerintah mesti disertai dengan pengungkapan elemen akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pedoman dalam menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. SAP digunakan sebagai acuan wajib saat menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Selain itu, SAP juga digunakan untuk mengatur informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkannya, mengukurnya dan melaporkannya. SAP juga digunakan oleh pengguna laporan keuangan, termasuk legislative untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Sedangkan untuk pihak auditor eksternal yaitu BPK akan menggunakan SAP sebagai kriteria dalam melakukan auditnya (Heriningsih, 2013).

Menurut Halim dan Kusufi (2012) standar akuntansi merupakan acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak di luar organisasi yang memiliki otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang bila dijabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.
- b. Laporan perubahan saldo anggaran memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Laporan operasional(LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

- d. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- e. Neraca merupakan suatu daftar gambaran posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca meliputi sekurang-kurangnya pos-pos seperti, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.
- f. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode tertentu dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual.

- g. Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga berisi informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.1.4 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut suripto (1999) pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara penjabaran atau penjelasan mengenai hal-hal informative yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui *statement* keuangan utama. Secara umum, tujuan dari pengungkapan ini adalah menyediakan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Semantar itu, suhardjanto (2011) menyatakan bahwa pengungkapan jika dikaitkan dengan laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan wajib memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Menurut Naim dan Rakhman (2000) dalam Suhardjanto (2011), persyaratan standar mencakup dua jenis pengungkapan, yaitu:

1. pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*): Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan lengkap yang memuat informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.
2. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*): Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan tambahan yang tidak disyaratkan oleh standar akuntansi dan dianggap relevan serta berguna bagi pemakai laporan keuangan.

berkaitan dengan sector pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat ataupun daerah, pengungkapan wajib mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah menyatakan bahwa pengungkapan lengkap adalah laporan keuangan yang berisi informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang diperlukan dapat ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan (CaLK) (Suhardjanto, 2011). Sedangkan pengungkapan sukarela biasanya tersaji dalam bentuk informasi tambahan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.1.5 Total asset

Aset daerah adalah bagian atau komponen yang sangat penting dalam penyajian neraca. Aset daerah terdiri dari aset tetap dan aset lancar serta inventory. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah

yang baik akan mendorong pelaporan keuangan yang baik karena pemerintah yang memiliki total aset yang lebih besar akan cenderung lebih kompleks dalam mengelola dan memelihara asetnya.

Sehingga konsekuensinya pemerintah harus lebih banyak mengungkapkan asset yang di milikinya dan memberikan perhatian khusus pada pengungkapan wajib menurut standar akuntansi pemerintah (Yusuf, 2010; Simamora dan Halim, 2013; Yulianingtyas, 2010).

Menurut Sudarmadji & Sularto (2007) dan Sudarsana (2013) dalam Romi Permadi (2017) selain nilai total asset, pengukuran ukuran perusahaan juga dapat dijelaskan dalam penjualan dan kapabilisasi pasar. Dalam penelitian ini, total asset dipilih karena nilai dari total asset lebih stabil dibandingkan dengan penjualan dan kapabilisasi pasar selain itu ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menjadi landasan mengapa variabel ini masih diteliti dalam penelitian ini. Nilai asset dalam pemerintahan daerah dapat dilihat dari jumlah asset dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.6 Jumlah SKPD

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang diberikan kewenangan dari kepala daerah untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan

Daerah tetapi dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD akan dikonsolidasikan oleh SKPKD untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten (Khasanah, 2014).

Alasan mengapa variabel ini dibahas dalam penelitian ini adalah karena dengan Jumlah SKPD akan menggambarkan seberapa kompleks pemerintahan tersebut sehingga tuntutan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan akan semakin besar pula (Hilmi et.al, 2012) selain hal tersebut ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menjadi landasan mengapa variabel ini masih diteliti dalam penelitian ini.

2.1.7 Jumlah Temuan Audit

Audit adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan-pernyataan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Khasanah, 2014). Audit negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan diaudit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Hasil dari pemeriksaan audit dapat berupa opini, temuan, kesimpulan, atau rekomendasi.

Temuan audit oleh BPK merupakan kasus-kasus di dalam laporan keuangan pemerintah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya temuan audit oleh BPK akan mempengaruhi jumlah pengungkapan sebagai koreksi. Semakin banyak jumlah temuan audit, maka BPK semakin membutuhkan penjelasan tambahan dalam laporan keuangan hal tersebutlah yang menjadi landasan mengapa variabel jumlah temuan audit diteliti dalam penelitian ini. Selain hal tersebut ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti juga menjadi landasan mengapa variabel ini masih diteliti dalam penelitian ini.

2.1.8 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan perbandingan antara total PAD dan total penerimaan daerah, sehingga dapat memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri operasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui pajak dan retribusi, yang merupakan sumber pendapatan daerah. Dengan rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang baik, jadi pemerintah seharusnya lebih mengungkapkan informasi keuangannya untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari publik.

Selain hal tersebut rasio ini juga dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemerintah daerah itu sendiri sehingga tuntutan kepada public terhadap transparansi

pengungkapan informasi keuangan pemerintah juga akan semakin tinggi. Selain hal tersebut ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti juga menjadi landasan mengapa variabel ini masih diteliti dalam penelitian ini.

2.1.9 Jumlah Populasi

Berdasarkan KBBI populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Selatan Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel yang penting dalam menentukan dana yang harus dialokasikan kepada setiap desa, jumlah penduduk juga menjadi faktor penting dalam penentuan proporsi DAU, selain itu jumlah penduduk juga penting dalam perhitungan proporsional pengalokasian anggaran TKD.

Sehingga undang undang nomor 28 tahun 2022 mencerminkan pentingnya jumlah penduduk sebagai variabel yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan pelayanan public didaerah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka menambah juga tingkat kompleksitas bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan juga tuntutan terhadap pelayanan pemerintah akan meningkat secara signifikan.

Selain hal tersebut ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti juga menjadi landasan mengapa variabel ini masih diteliti dalam penelitian ini.

2.1.10 Kesejahteraan

Berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2009 BAB 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa kesejahteraan merujuk pada suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Semakin meningkatnya kesejahteraan di suatu daerah akan berimplikasi pada peningkatan tuntutan politik terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, tuntutan untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat.

Selain hal tersebut tingkat kesejahteraan juga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan kesejahteraan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Jika tingkat kesejahteraan yang rendah, maka pemerintah daerah akan lebih fokus pada kegiatan pengembangan dan pengembangan infrastruktur, sehingga tingkat pengungkapan akan lebih tinggi. Sedangkan jika tingkat kesejahteraan yang tinggi, pemerintah daerah akan lebih fokus pada pemeliharaan dan pengembangan yang lebih efektif, sehingga tingkat pengungkapan akan lebih tinggi pula.

Oleh karena itu, tingkat pengungkapan laporan keuangan akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan penulis untuk diteliti dalam penelitian ini. Tingkat kesejahteraan dapat tercermin dari pendapatan rata-rata masyarakat dan operasionalnya dapat diukur melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di suatu wilayah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam melakukan suatu penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Henny Agnecia Uliarta Simbolon dan Christophorus Heni Kurniawan. (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Henny Agnecia Uliarta Simbolon dan Christophorus Heni Kurniawan (2018) yang berjudul "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, intergovernmental revenue, umur administratif, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Ukuran legislatif

tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Umur administratif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Difrensiasi fungsional tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

2. Lestavira Finakesti, Siska Aprianti, Bainil Yulina, dan Sri Hartaty. (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Lestavira Finakesti, Siska Aprianti, Bainil Yulina, dan Sri Hartaty (2022) yang berjudul “Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Kekayaan Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat pengungkapan LKPD. Tingkat Ketergantungan Berpengaruh Terhadap Tingkat pengungkapan LKPD. Rasio Kemandirian Berpengaruh Terhadap Tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah OPD Berpengaruh Terhadap Tingkat pengungkapan LKPD. Ukuran Legislatif Berpengaruh Terhadap Tingkat pengungkapan LKPD.

3. Edo Anggara dan Charoline Cheisviyanny. (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Edo Anggara dan Charoline Cheisviyanny (2020) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

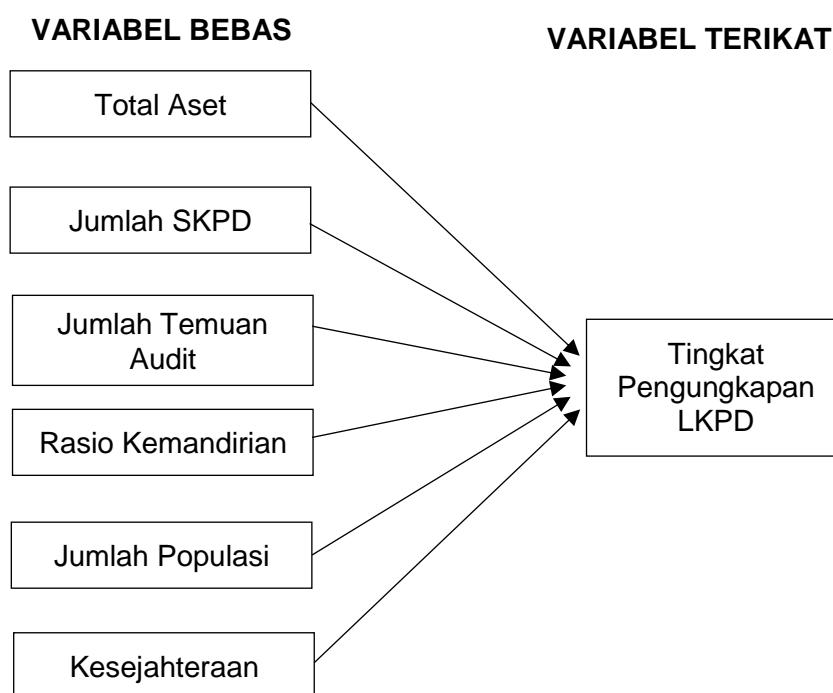
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pemerintah daerah menjalankan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan melaporkan informasi keuangan pada situs pemerintah daerah, khusus nya pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website pemerintah daerah, pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh dari ketergantungan terhadap pemerintah pusat terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan juga pengaruh dari temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada website pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah dan jumlah temuan audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Penulis akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Berikut adalah kerangka konseptual yang menggambarkan penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Total Asset Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Aset adalah salah satu sumber daya yang digunakan oleh suatu entitas untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber daya dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah dengan total aset yang semakin besar dan kompleks membutuhkan pengelolaan

aset yang baik, sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih banyak terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan aset.

Perusahaan yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melaporkan pengungkapan secara lengkap untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Rahardjo (2014), yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah yang dihitung dengan total aset berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Patrick (2010) menunjukkan bahwa variabel *size* yang dihitung dengan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan. Begitu pula penelitian dari Henny Agnesia Uliarta Simbolon dan Christophorus Heni Kurniawan (2018) serta Winda Meiliza Putri dan Fefri Indra Arza (2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah yang digambarkan dengan total asset berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_1 : Total Aset Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

2.4.2 Pengaruh Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan diferensiasi fungsional dalam pemerintahan di Indonesia. Diferensiasi fungsional

suatu daerah secara positif berhubungan dengan inovasi administrative (Damanpour, 1991; Patrick, 2007).

SKPD juga merupakan suatu sarana dalam berbagai informasi, ide, dan inovasi (Damanpour, 1991). Setiap daerah memiliki jumlah dari SKPD yang berbeda. Oleh sebab itu, keberadaan SKPD dalam suatu daerah, perbedaan fungsi, gagasan-gagasan, informasi, dan inovasi yang beragam dari setiap entitas didalamnya akan memunculkan suatu pengungkapan. Semakin banyak unit SKPD yang ada di daerah, semakin banyak pula yang harus diungkapkan.

Dan sebagai konsekuensinya, akan memiliki tekanan untuk mengungkapkan sesuai dengan SAP (Suhardjanto et al., 2010). Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestavira Finakesti, Siska Aprianti, Bainil Yulina, dan Sri Hartaty (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan dan M Rizal Yahya (2020) yang menyatakan bahwa Jumlah SKPD memengaruhi kepada tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_2 : Jumlah SKPD Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

2.4.3 Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Temuan audit BPK adalah kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah dimana daerah tidak

memenuhi ketentuan pengendalian intern dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Khasanah 2014). Liestiani (2008) menjelaskan bahwa temuan Audit yang dilakukan selama proses audit dapat memberikan informasi penting yang terkait dengan masalah-masalah yang terdapat pada auditee.

Temuan audit ini berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan yang akan di sajikan dalam CaLK yaitu semakin banyak jumlah temuan, maka semakin banyak pula jumlah pengungkapan yang akan disajikan. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan koreksi.

Pengungkapan yang lebih dilakukan bertujuan untuk memperbaiki dan mengoeksi temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK. Hal tersebut sejalan dengan penelitian M Ridwan dan M Rizal Yahya (2020) serta Era Fatwa Amaliah dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_3 : Jumlah Temuan Audit Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

2.4.4 Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Penggunaan rasio kemandirian keuangan daerah adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah dapat beroperasi tanpa bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, maka semakin besar keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak, dan meningkatnya tuntutan akan transparansi dalam pengungkapan dan pelaporan keuangan.

Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, dan akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Dwirandra, 2008). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henny Agnecia Uliarta Simbolon dan Christophorus Heni Kurniawan (2018), serta Lestavira Finakesti, Siska Aprianti, Bainil Yulina, dan Sri Hartaty (2022).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_4 : Rasio Kemandirian Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

2.4.5 Pengaruh Jumlah Populasi Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Jumlah populasi dapat berperan sebagai indikator yang menggambarkan tingkat kompleksitas suatu daerah. Semakin banyak populasi, semakin rumit tantangan yang dihadapi oleh daerah

tersebut. Tingkat kompleksitas permasalahan yang meningkat akan memicu kebutuhan untuk meningkatkan pengungkapan informasi (Hilmi dan Martani, 2012). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dekeng Setyo Budiarto dan Luki Indarti (2019), serta Meri Andriani, Elfitri Santi, dan Rasyidah Mustika (2019).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_5 : Jumlah Populasi Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

2.4.6 Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Semakin meningkatnya kesejahteraan di suatu wilayah akan menyebabkan peningkatan tuntutan politik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan juga menaikkan tuntutan untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan dapat tercermin dari pendapatan rata-rata masyarakat, dan dari segi operasional, dapat diukur melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di wilayah tersebut hal ini sesuai dengan cara pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Aswar, Alvin Yoga Fanany, Mahendro Sumardjo, Meilda Wiguna, dan

Eka Hariyani (2022), serta Martani, D., Nastiti, D., & Wicaksono, P. T (2014).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H_6 : Kesejahteraan Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD